

SKRIPSI

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PROGRAM
PANTAI BERSERI DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



Oleh:

ARDIANSYAH PRATAMA

Nomor Induk Mahasiswa: 105641105519

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2023

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PROGRAM
PANTAI BERSERI DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan oleh

ARDIANSYAH PRATAMA

Nomor Stambuk : 105641105519

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Proposal : Collaborative Governance dalam Program
Pantai Berseri di Kabupaten Kepulauan
Selayar

Nama Mahasiswa : Ardiansyah Pratama

Nomor Induk Mahasiswa : 105641105519

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

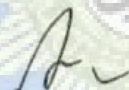
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

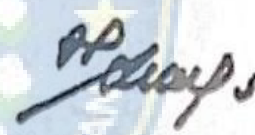
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd


Dr. Junaedi, S.H., M.H., M.Si

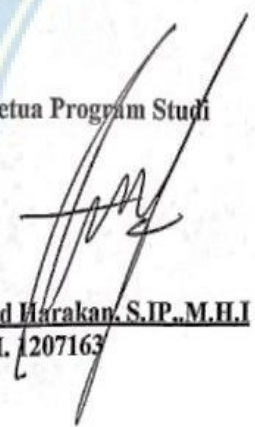
Mengetahui :

Dekan

Ketua Program Studi





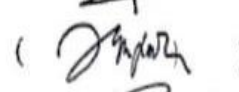

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM.730727


Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I
NBM. 207163

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat Keputusan/Undangan menguji Ujian skripsi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor:0161/FSP/A.4-II/VII/44/2023 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Kamis, 20 Juli tahun 2023.



1. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd (Ketua) ()
2. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si ()
3. Dr. Haerana, S.Sos., M.Pd ()
4. Rudi Hardi, S.Sos., M.Si ()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Ardiansyah Pratama

Nomor Stambuk : 105641105519

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah di tulis/dipublikasikan oleh orang lain atau plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Makassar, 26 Mei 2023

Yang menyatakan

Ardiansyah Pratama

ABSTRAK

ARDIANSYAH PRATAMA. 2023 *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PROGRAM PANTAI BERSERI DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR (Dibimbing oleh H. Ansyari Mone dan Junaedi).

Tujuan penelitian ini yaitu untuk terciptanya kawasan pantai yang bersih dan terciptanya kolaborasi yang efektif dengan sebagaimana hal *collaborative governance* dalam program pantai berseri yang terlaksana di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah kualitatif dan tipe penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif pada fenomenologi. Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan. Pengabsahan data yang digunakan adalah Triangulasi sumber, Triangulasi teknik, dan Triangulasi waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *collaborative governance* dalam program Pantai Berseri dilakukan melalui 3 indikator yaitu: 1) Partisipasi adanya bentuk partisipasi yaitu partisipasi kelompok masyarakat dan pemerintah dalam menjalankan kegiatan atau program pantai berseri, dengan ikut serta dalam berjalannya program pantai berseri, yang merupakan alat dimana warga atau masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan program pantai berseri. 2) Komunikasi dalam bentuk komunikasi yang dilakukan yaitu pihak pemerintah turun langsung menginformasikan atas kebijakan yang akan dijalankan terkait program pantai berseri dengan melukukan pertemuan bersama tokoh-tokoh masyarakat dengan pemerintah. Begitu baiknya komunikasi menjadi kunci utama kolaborasi berjalan dengan baik sehingga pelaksanaan program pantai berseri berjalan dengan semestinya. 3) Akseptasi dalam hal bentuk akseptasi untuk merelasasikan perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas dan tujuan organisasi dengan memiliki tanggung jawab penuh dalam pelaksanaan kegiatan program pantai berseri.

Kata Kunci : Kolaborasi, Program Pantai Berseri

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, Salawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala skripsi yang berjudul “*Collaborative Governance Dalam Program Pantai Berseri Di Kabupaten Selayar*”. Skripsi yang penulis buat bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program sarjana strata satu (S1) pada fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Satu penghargaan tertinggi penulis berikan pada Kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Arling dan Ibu Andi Rosdiana yang dengan ketulusan hati dan segenap pengorbanannya serta kasih sayang kepada penulis serta menjadi tulang-tulang penguat penulis dalam menghadapi begitu banyak hambatan dan rintangan dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini penulis mendapat banyak masukan, bimbingan dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak, sehingga melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos. M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ahmad Harakan, S.IP, M.Hi dan Nurkhaerah, S.IP, M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Junaedi,SH., M.H., M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Bapak A. Luhur Prianto, S.IP., M.Si selaku Penasehat Akademik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas ilmunya yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan serta seluruh staf pegawai/administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas pelayanannya selama ini.
6. Pihak staf Kantor Kepala Desa Mekar Indah yang telah banyak membantu dan sangat mendukung dalam memberikan informasi terkait penelitian ini.
7. Untuk kerabat keluarga yang telah membantu dalam mendapatkan informasi terkait penulisan saya.
8. Saudara dari awal masuk kampus sampai sekarang IP.B sekaligus teman kelas dari semester, Terima kasih untuk 4 tahun yang sangat berkesan.
9. Teman – teman Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan (HIMJIP) telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga segala bantuan, doa dan motivasinya dinilai ibadah di sisi Allah SWT, Aamiin. Semoga karya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca guna menambah ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan Ilmu Pemerintahan.

Billahi Fii Sabilil Haq Fastabiqul khairat.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Makassar, 26 Mei 2023

Ardiansyah Pratama



DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	
B. Rumusan Masalah	
C. Tujuan Penelitian	
D. Manfaat Penelitian	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	
B. Landasan Teori	
C. Kerangka Pikir	
D. Fokus Penelitian	
E. Deskripsi Fokus Penelitian	
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	
B. Jenis dan Tipe Penelitian	
C. Sumber Data.....	
D. Informan	
E. Teknik Pengumpulan Data	
F. Teknik Analisis Data.....	
G. Keabsahan Data.....	
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	
B. Hasil Penelitian.	
C. Hasil Pembahasan.	
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.	

B. Saran.....
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN.....



DAFTAR GAMBAR

2.2 Bagan Kerangka Pikir	
4.2 Peta.....	
4.3 Dokumentasi Kerjasama Para kelompok Masyarakat dalam pelaksanaan program Pantai Berseri	
4.4 Dokumentasi penyampaian terkait akan dilaksanakan program atau Gerakan Pantai Berseri dengan melakukan pertemuan	



DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu	6
3.1 Informan Penelitian.....	
4.2 Peta.....	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kolaborasi adalah salah satu bentuk proses antar sosial, yang di dalamnya terdapat sebuah kegiatan tertentu yang telah dikhususkan dalam tujuan tercapainya suatu keinginan bersama dan juga saling bantu serta saling memahami kegiatan tertentu. Kolaborasi artinya bekerjasama dalam tercapainya suatu tujuan tertentu bersama, dan suatu proses antar sosial yang sangat berpotensi luas. Kolaborasi juga sistem yang dilibatkan didalamnya suatu pembagian tugas, di mana masing-masing seseorang kerjakan tiap pekerjaan yang mana ialah tanggung jawabnya agar mencapai keinginan. Kolaborasi ialah usaha agar tercapainya keinginan yang sudah ditentukan melewati pemberian pekerjaan ataupun tugas, bukan untuk pengkotaan pekerjaan namun untuk suatu kesatuan pekerjaan, yang semua tertuju dalam mencapai suatu tujuan (Anriana, 2018).

Kolaborasi artinya suatu proses ialah serangkaian cara atau proses dalam memerintah ataupun mengatur dengan cara institusional. Secara norma kolaborasi adalah tujuan filosofi atau aspirasi untuk pemerintah dalam tercapainya kegiatan dengan mitranya maupun para partner. Kolaborasi dalam hal ini adalah proses respon pada perubahan sampai pemerintah tetap efektif dan selalu aktif dalam sebuah lingkungan manajemen publik yang sangat singkat dan selalu melibatkan para elemen-elemen lainnya untuk netralisasi dalam tujuan yang diharapkan (Tasruddin, 2018). Kolaborasi butuh macam-macam aktor, baik itu organisasi

maupun individu yang saling membantu kerja tugas dan mencapai keinginan bersama. Kolaborasi adalah kunci segala keterbatasan yang di alami pada organisasi atau individu (Nawir, 2022).

Dalam hal ini kolaborasi menggantikan Pendekatan pendekatan yang mendorong interaksi antar sama-sama anggota dan kelompok hirarkis. Pendekatan hirarkis menekan pada komunikasi searah, ada tokoh lebih dominan. Dimana kerjasama ialah suatu interaksi antar sosial dan sifat asosiatif yang ada pada saat terdapat perkumpulan masyarakat memiliki pandangan yang mirip dalam mencapai keinginan bersama dengan kerjasama (Tanjung, 2019). Pemerintah bukan cuma memanfaatkan kapabilitas yang internal dalam pelaksanaan rencana eksekusi dan kebijakan. Keterbatasan pada sumber daya, jaringan dan kapasitas jadi pakar pendukung terlaksanakannya kebijakan tersebut atau rencana, terdorongnya pemerintah dalam kerjasama bersama organisasi sipil, pemerintahan dan juga masyarakat, dengan organisasi sipil dalam hal terjalin hubungan kerja sama untuk merealisasikan keinginan kebijakan ataupun perencanaan (Febrian, 2016).

Kolaborasi pemerintah di artikan suatu peraturan yang mengatur satu maupun lebih dari satu lembaga publik dengan cara langsung melibatkan dan pemegang kepentingan nonpublik dalam langkah mengambil putusan kolektif yang bersifat orientasi Konsensus, musyawarah dan formal dalam buat ataupun implementasi kebijakan Publik ataupun aset publik atau kelola program. Dalam sebuah Negara ataupun wilayah untuk capai tujuan di perlukan ada kolaborasi dari beberapa komponen diantaranya masyarakat dengan pemerintah (Nurianita Amsir, 2021).

Dalam suatu kolaborasi dalam pelaksanaan sebuah program di suatu daerah di perlukan adanya faktor manusia yang berpotensi atau terlibat dalam program. Potensi manusia di suatu daerah khususnya untuk pemerintah daerah dan juga tokoh-tokoh masyarakat sangat besar perannya dalam melakukan penyelenggaraan suatu program dalam hal untuk menentukan keberhasilan penyelenggaraan suatu program didalam segala komponen baik itu Politik, Ketertiban serta juga keamanan ekonomi ataupun social budaya. Serta komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat sangat penting agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi dalam proses penyelenggaraan program, baik mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan juga pengawasan (Alfianto, 2021).

Seperti yang telah diselenggarakan di Kepulauan Selayar yang mana adanya kampanye penyelenggaraan Gerakan Pengurangan Sampah Plastik (Pantai Berseri) yang di pusatkan di Dusun Borong-Borong, Desa Mekar Indah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Kepulauan Selayar. Kegiatan kampanye ini dan kegiatan bersih sampah plastik ini yang melibatkan pemerintah Kabupaten dan Masyarakat. Secara massif dilaksanakan serentak di 11 Kecamatan dengan lokus 22 kilometer pesisir pantai yang di bersihkan. Dengan apresiasi sinergi dalam upaya mengurangi sampah plastik dan membersihkan laut dan pantai dari plastik sekaligus mendukung pengelolaan sampah. Dalam hal, masalah Sampah harus terselesaikan, sampah yang sudah mengotori lingkungan di laut dan memiliki dampak untuk kelestarian alam.

Dilaksanakann kampanye gerakan pengurangan sampah plastik (Pantai Berseri) karena terdapat dampak sampah plastik yang bermacam, terutama

lingkungan, dan juga kesehatan serta pariwisata juga terdampak dan mampu mempengaruhi ketersediaan ikan. Selain itu, penyelenggaraan program Pantai Berseri juga untuk menjaga keamanan pangan, dan juga menjaga stabilitas ekspor, hal ini harus diantisipasi. Untuk itu, program ini sangat mendorong agar masalah sampah dapat terselesaikan dapat ditingkatkan. Diharapkannya Kepulauan Selayar memiliki peraturan daerah berkaitan sampah yang mampu mendorong meningkatkan produktivitas hasil dari perikanan juga program prioritas bupati terkait kawasan ekonomi terkhusus untuk pariwisata.

Keberhasilan pelaksanaan program gerakan pengurangan sampah plastik (Pantai Berseri) baik di tinjau dari bidang pembangunan fisik maupun nonfisik akan selalu bantu pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam hal pengurangan sampah plastik di pesisir pantai baik itu secara jangka panjang maupun jangka pendek. Hasil yang sangat baik dari kegiatan berbasis masyarakat untuk mencapai untuk masyarakat ikut kolaborasi bersama pemerintah dalam program. Dan kolaborasi yang baik akan tumbuh rasa memiliki untuk apa yang dijalankannya, sampai berlanjut dan kesinambungan selalu berlangsung. Maka dari itu, harus di lakukan suatu penelitian dengan cara mendalam di tinjau dari segi kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis memutuskan untuk menyusun skripsi penelitian yang berjudul “*Collaborative Governance* Dalam Program Pantai Berseri Di Kabupaten Kepulauan Selayar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya rumusan masalah pada penelitian ini adalah : bagaimana *collaborative governance* dalam melaksanakan program Pantai Berseri.

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana *collaborative governance* dalam melaksanakan program Pantai Berseri.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diinginkan bisa memberi manfaat yang teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat penelitian ini diantaranya:

a. Manfaat teoritis

Sebagai referensi kajian Ilmu Pemerintahan dan sebagai bahan referensi semua pihak yang membutuhkan informasi yang berkaitan tentang *collaborative governance* dalam program pantai berseri di Kabupaten Kepulauan Selayar .

b. Manfaat praktis

Dalam penelitian ini agar bisa memberikan masukan yang bermanfaat maupun pelajaran yang bermanfaat untuk Pemerintah dan masyarakat dalam melakukan

Kerjasama atau kolaborasi dalam meningkatkan Kerjasama yang baik terkait pengurangan sampah plastik.



BAB II

PEMBAHASAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ialah penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya yang bisa diambil dari beberapa sumber ilmiah seperti, jurnal penelitian, skripsi tesis atau disertasi. Dalam mendukung masalah pada pembahasan, upaya peneliti malacak beberapa *literature* serta penelitian terdahulu (*prior research*) yang masih relevan pada permasalahan yang jadi objek penelitian sekarang. Selain itu, yang jadi syarat mutlak ialah pada penelitian ilmiah menolak yang namanya plagiatisme atau *mencopy* secara utuh hasil karya tulisan orang lain. Berikut adalah penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1.	Akbar Tanjung, 2019	Kolaborasi dinas kebudayaan kabupaten gowa dengan masyarakat adat dalam pelestarian di kawasan pariwisata benteng somba opu.	Peran Dinas Kebudayaan berperan penting untuk berkolaborasi dengan Masyarakat Adat, dalam indikator. Partisipasi yang intensif sangatlah penting dalam kolaborasi. Kolaborasi dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Akseptasi yang dimaksud disini adalah nilai publik yakni dihasilkan dari efensi,

			<p>demokrasi dalam institusi/organisasi, dan proses kolaborasi. Komunikasi merupakan kelebihan dari kolaborasi yang membentuk pembelajaran saling menguntungkan (mutual learning), pembangunan komunikasi (<i>building communities</i>), dan pemanfaatan proses interaktif (<i>employing interactive</i>). Akan tetapi dalam pencapaian kolaborasi belum berjalan dengan efektif. Hal tersebut terjadi karena koordinasi yang menyebabkan kolaborasi tersebut tidak berjalan dengan efektif. Penelitian ini yang digunakan adalah kualitatif dan tipe penelitian yang digunakan adalah tipe fenomenologi. Jumlah informan sebanyak 6 orang yang dipilih berdasarkan pandangan bahwa informasih memiliki pengetahuan dan informasih mengenai objek yang diteliti yakni, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Masyarakat Adat,</p>
--	--	---	---

			Wisatawan lokal, dan Masyarakat kawasan Benteng Somba Opu. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis hasil menggunakan komponen-komponen kolaborasi dari Agranoff.
2.	Mohamad Jihad Ayatullah Bay, 2020	Kolaborasi Antara Masyarakat dan Pemerintah Dalam Mengelola Program Persediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat(PAMSIMAS) Di Desa Ombay Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor	Proses kolaborasi dalam bentuk <i>co-determination</i> , <i>co-financing</i> dan <i>co-production</i> antara masyarakat dan pemerintah dalam mengelola program PAMSIMAS di Desa Ombay Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan informan sebanyak lima orang yang dipilih berdasarkan pandangan pengetahuan. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrument berupa; observasi, dokumentasi dan dikembangkan melalui wawancara terhadap informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam bentuk <i>co-determination</i>

			<p>berjalan efektif dan efisien hal ini ditandai dengan adanya sosialisasi dan pembentukan Kelompok KKM. Kemudian Dalam bentuk co-financing berupa pembiayaan belum berjalan secara efektif disebabkan tidak adanya biaya dari pemerintah setempat. dan pembayaran juga belum efektif ditandai dengan rendahnya pendapatan masyarakat, dan kondisi politik Desa Ombay yang belum stabil. Serta co-production berjalan secara efektif dan efisien, hal ini ditandai dengan adanya komitmen waktu pelaksanaan program ditentukan secara bersama antara pemerintah dan masyarakat.</p>
3.	Nurianita Amsir, 2021	Kolaborasi Pemerintah dengan Masyarakat dalam Percepatan Pengendalian Covid-19 (Studi kasus Kebijakan Penerapan PSBB)	<p>Kolaborasi adalah kerja sama yang di lakukan antara aktor organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kolaborasi pemerintah dengan masyarakat dalam percepatan pengendalian Covid-19 di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian</p>

			<p>studi kasus dengan jenis penelitian kualitatif fokus penelitian ini berfokus pada teori Steven Lewis Yaffee tahapan tahapan kolaborasi terdiri dari tiga tahapan yaitu problem setting, direction setting, dan implementation.</p> <p>Hasil Penelitian menunjukkan bahwa latar belakang (<i>Problem setting</i>) Kolaborasi Pemerintah dengan masyarakat dalam penerapan PSBB yaitu tingginya kasus persebaran <i>Covid-19</i> di Kota Makassar selanjutnya tahapan penetapan tujuan (<i>direction setting</i>) untuk menekan persebaran <i>Covid-19</i> di Kota Makassar dan penerapan (<i>Implementation</i>) penerapan PSBB dengan melibatkan masyarakat dan seluruh Pemerintah sampai pada tingkat kecamatan dan kelurahan.</p>
--	--	---	--

Penelitian pertama lebih fokus pada upaya kolaborasi untuk melihat ekspektasi nilai adat kebudayaan. Penelitian kedua lebih fokus pada kolaborasi

dalam sosialisasi program PAMSIMAS. Penelitian ketiga lebih fokus pada kolaborasi dalam pengendalian wabah *Covid-19*.

Terkait hasil penelitian sebelumnya, bahwasanya penelitian diatas mempunyai kesamaan atas penelitian yang akan dilakukan bagi peneliti ialah membahas kolaborasi pemerintah dengan masyarakat. Akan tetapi, perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian ini lebih fokus pada upaya kerjasama atau kolaborasi dalam penerapan program pantai berseri yang mana melakukan gerakan pengurangan sampah plastik.

B. Landasan Teori

1. Konsep Kolaborasi

Secara epistemologi, kata kolaborasi berasal dari bahas Inggris yaitu '*co-labour*' yang artinya bekerja bersama. Pada abad ke-19 kata kolaborasi mulai digunakan saat industri telah berkembang. Organisasi saat masa itu menjadi semakin kompleks. Divisi-Divisi dalam pembuatan struktural organisasi mulai dibuat untuk pemberian tugas bagi tenaga pekerja dalam organisasi tersebut. Kompleks organisasi menjadi titikawal sering digunakannya kolaborasi dalam bidang organisasi (Arrozaaq, 2016). Secara filosofi kerja sama adalah usaha beberapa pihak dalam tercapainya tujuan. Kolaborasi yaitu kerjasama yang dilakukan mendasari persetujuan antar 2 pihak kolektif atau lebih khusus dalam usaha memadukan gagasan dalam hal mencapai tujuan. Kerjasama sebuah penyaluran informasi atau jaringan, kegiatan sumber daya, dan kapabilitas

organisasi pada 2 ataupun lebih bidang dalam bekerjasama capai tujuan yang tidak mampu di capai dengan kerja sendiri (Salma, 2020).

Kolaborasi diartikan sebuah langkah capai suatu tujuan yang tidak dapat di lakukan dengan cara individu. Terdapat didalamnya mengembangkan dan membangun juga menyatukan pendapat dalam capai tujuan (Tanjung, 2019). Kolaborasi merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Kolaborasi ialah sebuah pola proses antar sosial, yang mana di dalamnya ada kegiatan tertentu yang tertuju dalam tercapainya keinginan bersama dan saling bantu dan saling paham kegiatan masing - masing. Kolaborasi adalah kerja sama-sama dalam capai tujuan sama-sama. Seperti biasanya, kolaborasi melibatkan bagi tugas untuk seseorang, dimana tiap-tiap orang mengerjakan pekerjaan yang diberikan (Nur, 2019).

Sedangkan dalam istilah administrasi, kolaborasi adalah usaha untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan melalui pembagian tugas/pekerjaan, tidak sebagai pengkotakan kerja akan tetapi sebagai satu kesatuan kerja, yang semuanya terarah pada pencapaian tujuan .

a. Bentuk – bentuk Kolaborasi

Ada 3 jenis kolaborasi yang berdasarkan perbedaan antar organisasi grup atau didalam sikap grup, yaitu diantaranya:

1) Kolaborasi primer

Grup serta individual sungguh digabung jadi satu. Grup berisikan semua kehidupan terhadap individual, masing - masing saling kejar dalam setiap pekerjaan, dalam kepentingan semua anggota di dalam grup. Misalnya,

kehidupan keluarga untuk masyarakat primitive, ialah kehidupan rutin setiap hari dalam berbicara dan lainlainnya.

2) Kolaborasi sekunder

Kolaborasi sekunder ialah ciri-ciri untuk masyarakat modern saat ini. Kolaborasi sekunder begitu spesialisir dan di formalisir, dan masing - masing individual cuman membangktikan sebagian daripada kehidupan pada grup yang disatukan. perilaku orang - orang lebih individual serta diadakan perhitungan - perhitungan. Misalnya, Kolaborasi di kantor - kantor perdagangan, pabrik - pabrik, pemerintah dan juga lainnya.

3) Kolaborasi tertier

Hal yang jadi dasar pada kolaborasi ialah masalah yang laten. Perilaku dari pihak - pihak yang kerjasama ialah normal oportunis. Organisasi yang begitu longgar serta mudah terpecah. Apabila alat bersama tidak saling bantu masing - masing pihak untuk capai tujuan. Misalnya ialah hubungan buruh dan hubungan dua partai dalam usaha melawan partai ketiga, pimpinan perusahaan.

b. Tahapan-tahapan Kolaborasi

Tahapan-Tahapan pada Pembentukan kolaborasi dalam pelaksanaan kolaborasi dibutuhkan beberapa tahap. Ada 3 tahap dalam kolaborasi yaitu :

1) *Problem Setting*

Problem setting ialah upaya menentukan masalah, identifikasi sumber - sumber, dan buat perjanjian dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain.

2) *Direction Setting*

Direction Setting ialah penentuan aturan dasar, penyusunan agenda dan pengorganisasi sub - sub kelompok. Satukan informasi yang, meneliti pilihan, serta memperbanyak persetujuan yang diharapkan.

3) *Implementation*

Implementation aturan dasar yang sudah disetujui tersebut yaitu ketentuan yang sudah disetujui hingga dalam pelaksanaan harus terus dimonitor.

c. Model kolaborasi

Kolaborasi diperlukan selama dengan adanya interpedensi antar organisasi atau aktor. Makin besar interpedensi antar organisasi atau aktor, baik itu cara vertikal atau horizontal, maka dari itu makin besar kebutuhan dalam kolaborasi. Interpedensi kemudian mendukung peningkatan intensitas dan frekuensi komunikasi antar organisasi yang ada pada tindakan dan keputusan yang dibikin sama-sama serta dikerjakan dengan cara kolektif. Untuk memutuskan interpedensi, model kolaborasi ialah sebuah citra mental yang mencoba mensederhanakan interaksi antara organisasi dan kompleksitas relasi. Dalam penyederhanaan teridentifikasi banyak dimensi yang terbentuk relasi dan interaksi.

1) Model *Ansell and Gash*, model ini memiliki 4 variabel yang menjadi pusat yaitu :, desain kelembagaan, kondisi awal, proses kolaborasi dan

kepemimpinan. Masing - masing variabel mampu dikecilkan jadi sub - sub variable.

- 2) Model *Agranof - Mc Guire*, model berdasar dalam 2 dimensi yaitu : strategi dan aktifitas.
- 3) Model *Buttler - Coleman*, berdasarkan dimensi level interaksi dan dimensi ukuran kelompok. Berdasarkan paparan ini maka menghasilkan lima model yaitu: *library, solicitation, tim, community, dan process support*.
- 4) Model *Weber et.al*, Kolaborasi yang lolos menekan integrasi beberapa fungsi. Integrasi yang meliputi, lintas arena kebijakan, fungsi birokrasi dan level pemerintahan juga ikut serta organisasi non pemerintah dan masyarakat untuk memecah konflik dalam langkah pengimplementasian.

Kolaborasi ialah suatu langkah adanya kesadaran pada pihak yang mempunyai batas untuk melihat sebuah konflik dalam upaya mengeksplorasi perbedaan itu dalam cari solusinya. Ada 3 alasan organisasi dalam melakukan kolaborasi, yaitu diantaranya:

- 1) Suatu organisasi butuh kerjasama karena susah dalam penyelesaian tugas tertentu seorang tanpa adanya bantuan dari seseorang yang lain.
- 2) Terkait kolaborasi manfaat yang mampu diperoleh Organisasi mampu lebih banyak bila dibanding bersama pekerja individual.
- 3) Melewati Kerjasama Perusahaan mampu menekan biaya produksi supaya barangnya murah serta mempunyai daya saing di pasaran.

Kerja sama yang diusulkan ialah kerja sama antara antar lembaga atau organisasi dalam capai tujuan yang kurang mampu dilakukan atau dicapai dengan mandiri, istilah kerja sama masih dipakai secara gentian, 2 periode harus di setuju. Pada hakikat kerja sama diketahui hanya kerja sama pada para pihak baik individu maupun kelompok sebuah pola putusan dalam kerjaan, kesamaan visi misi dan tujuan seharusnya tercapai dengan Bersama-sama yang menyusahkan tercapainya bila masing - masing pihak kerja dengan cara individual ataupun sistem personal (Salma, 2020).

Menurut Yuliani (2017) terdapat tiga prinsip Kolaborasi yang harus ditekankan pada masing - masing dalam melaksanakan kolaborasi.

1) Partisipasi (*Participation*)

Partisipasi adalah keterlibatan komponen *governance* dalam mewujudkan tujuan yang akan dicapai baik secara fisik maupun non-fisik. Partisipasi masyarakat sebagai salah satu prinsip *good environmental governance* terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: a. Ikut serta dalam meningkatkan kualitas lingkungan di perumahan dengan menanam tanaman dalam pembuatan sumur resapan (bagi daerah yang memungkinkan) dan pengelolaan sampah, b. Ikut serta melaksanakan kegiatan usaha yang tidak merusak lingkungan, c. Berpartisipasi aktif dalam komunitas masyarakat perlindungan lingkungan. Keterlibatan masyarakat harus didasarkan pada prinsip penyediaan informasi yang transparan dan lengkap serta pemberitahuan kegiatan terlebih dahulu.

2) Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi adalah informasi yang disampaikan dari satu tempat lain dengan pemindahan informasi, ide, emosi, keterampilan dan lain-lain dengan menggunakan simbol seperti kata, figur dan grafik serta memberi, meyakinkan ucapan dan tulisan. Komunikasi adalah proses atau tindakan menyampaikan pesan (*message*) dari pengirim (*sender*) ke penerima (*receiver*), melalui suatu medium (*channel*) yang biasa mengalami gangguan (*noise*). Dalam definisi ini, komunikasi haruslah bersifat intentional (disengaja) serta membawa perubahan.

3) Akseptasi (*Acceptable*)

Akseptasi merupakan salah satu pernyataan penting yang menyatakan kesanggupan atau siap untuk melaksanakan dan melakukan pembayaran dengan lancar melalui wesel yang telah diterbitkan secara eksportir dan berjangka, dengan mengikuti waktu jatuh tempo yang telah ditentukan secara maksimal. Dengan begitu, akseptasi juga disebut acceptance berbentuk janji yang dapat digunakan untuk membayar beberapa pihak terkait yang merasa tertarik. Akseptasi bisa dikatakan sebagai janji atau perjanjian untuk membayar oleh pihak tertarik dengan cara membubuhkan tanda tangan dalam surat wesel. Apabila telah diakseptasi, wesel ini menjadi sama dengan promes (surat sanggup bayar), yang berarti dapat diperdagangkan atau dapat dijual kepada pihak lain sebelum tanggal jatuh tempo. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah *acceptance*. Akseptasi harus dinyatakan dengan kata akseptasi atau dengan cara lain yang sama, maksudnya tanda tangan saja, dan

pihak tertarik dibubuhkan pada halaman muka, surat wesel sudah berlaku sebagai akseptasi.

Tiga prinsip kolaborasi diatas sangat dibutuhkan dalam memulai suatu Kolaborasi karena prinsip-prinsip itu begitu penting didalam ciptakannya kerja sama yang baik (Triwahyuni, 2018).

2. Collaborative Governance

Dalam *collaborative governance* aplikasi dan konsep didefinisikan terkait *collaborative governance* adalah sebuah bentuk pengendalian yang mana 1 ataupun lebih lembaga publik dengan cara langsung para pemangku kepentingan *stakeholder non state* dilibatkan pada langkah pengambilan keputusan kolaboratif yang berorientasi consensus, deliberative, sifatnya formal dan tujuan demi mengelola program publik, aset publik atau menerapkan atau membuat kebijakan publik. Indikator langkah kolaboratif dalam bentuk *collaborative governance* menurut Anshell dan Gash tahun (2008) sebagai berikut:

- 1) *Face To Face Dialogue* (Dialog tatap muka) *collaborative governance* di bangun melewati komunikasi atau dialog dengan cara tatap muka antara pemangku kepentingan *stakeholders*. Langkah pada *collaborative governance* diorientasi untuk kesepakatan atau *consensus*, maka dari itu komunikasi secara tatap muka adalah bagian yang begitu penting dalam proses kolaborasi.
- 2) *Trust Building* (Membangun kepercayaan) bukan cuman dilakukan negosiasi antara aktor, tapi lebih pada bangun kepercayaan antara

pemangku kepentingan. Karena kurang percaya antara *stakeholder* ialah faktor adanya *collaborative governance*.

- 3) *Commitment To The Process* (Komitmen terhadap proses) kepemimpinan dalam hal menggali nilai - nilai manfaat sama-sama dalam capai komitmen para aktor pada proses kolaborasi sampai kepemimpinan yang sudah ada harus dapat mendukung memperdayakan dan memfasilitasi para actor terlibat.
- 4) *Shared understanding* (Saling memahami) untuk aktor harus sama-sama paham ataupun persepsi pada tujuan yang mampu dicapai secara bersama. *Shared Understanding* adalah persetujuan terkait pengetahuan yang relevan, yang dibutuhkan dalam atasi konflik. Dalam *collaborative governance* perlu mempunyai pemahaman yang sama untuk jadi tujuan bersama-sama.
- 5) *Itermediate Outcomes* adalah menjadi hasil proses yang penting dalam membangun momen yang mampu mengakibatkan berhasinya kolaborasi.

Dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara secara modern, dikenal konsep *good governance*. Darinya diajarkan pilar-pilar yang harus ada dalam suatu negara; yang itu berfungsi sebagai lembaga penyelenggara kehidupan bernegara. Pilar-pilar itu adalah:

- 1) *State* (Negara/Pemerintah)
- 2) *Civil Society* (Rakyat/Masyarakat Sipil)
- 3) *Private Sector* (Perusahaan/Swasta).

Good governance mengajarkan peran ketiga pilar di atas secara garis besar. Penyelenggara kehidupan bernegara menjadi kewenangan dan tanggung-jawab *State* (Negara/Pemerintah). Sedangkan *Civil Society* (Rakyat/Masyarakat Sipil) berperan sebagai pengendali (*control*) gerak sistem otoritas (negara) yang dijalankan oleh Pemerintahnya. Dan *Private Sector* (Perusahaan/Swasta) berperan (membantu Pemerintah) menggerakkan roda perekonomian. Kegiatan perekonomian di sini diorientasikan pada arus sirkulasi modal atau *capitalizm*.

Ada dinamika dalam ketiga pilar di atas. Dalam studi-studi pemerintahan dikenal konsep desentralisasi; yang itu mempengaruhi pilar yang pertama, yaitu *State* (Negara/Pemerintah). Lalu, ada dalam keilmuan sosiologi-positivis konsep *social group* yang salah satunya dimodelkan oleh Ferdinand Tonnies, itu mempengaruhi pilar kedua, yaitu *Civil Society* (Rakyat/Masyarakat Sipil).

3. Konsep Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah kata yang berasal dari pemerintah yang artinya sesuatu hal yang perlu dilakukan. Pada kata tersirat ada bagian unsur yang beda pada kata "Perintah" ialah kewajiban dalam tunjukkan komitmen dilaksanakan hal apa yang dibutuhkan. Ada yang menerima dan memberi perintah. Adanya hubungan fungsional antar keduanya. Istilah kepemimpinan pemerintahan dan pemerintahan memiliki arti yang berbeda. Perintah ialah kata - kata yang artinya membuat sesuatu dengan cara akurat. Pemerintah ialah organisasi atau badan yang melaksanakan kewenangan pemerintahan serta pemerintahan ialah cara, urusan direksi atau tindakan.

Secara Ilmiah arti dari pemerintah bisa di bedakan jadi 2 pengertian adalah pemerintah sebagai instrumen atau organ Negara yang melaksanakan tugasnya serta pemerintah sebagai difungsi pemerintahan. Dapat juga dibedakan antar istilah pemerintah dalam artian alat antara pemerintah pada arti sempit serta pemerintah dalam arti yang luas. Pemerintah arti sempit ialah kekuasaan yang di miliki pada otoritas eksekutif sedangkan, pemerintah arti luas artinya semua organ Negara serta Pemerintahan (Salma, 2020).

Pemerintah daerah daerah salahsatu alat dalam sistem selenggraan pemerintahan. Pemerintah daerah juga merujuk terhadap otoritas administrasi di sebuah daerah yang kemungkinan kecil dari suatu Negara yang mana Negara Indonesia adalah suatu Negara yang wilayah-nya terbagi atas daerah provinsi. Daerah provinsi dibagi atas Daerah Kabupaten serta Daerah Kota. Tiap-tiap daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, serta Daerah Kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur oleh undang - undang.

Pemerintah daerah adalah kepala daerah menjadi unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin pelaksana pada urusan pemerintahan yang jadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan, pemerintahan daerah ialah penyelenggara pada urusan Pemerintahan dari Pemerintah Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi serta tugas pembantuan pada prinsip otonomi seluasnya pada sistem juga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Anriana, 2018).

Pemerintah daerah merupakan bagian institusi atau lembaga resmi yang mempunyai wewenang dalam mengelola beberapa model keperluan masyarakat disuatu daerah baikitu terhadap pelayanan, penyelenggaraan pembangunan maupun pemenuhan kebutuhan dasar secara berlanjut dan partisipasi dan dilibatkan semua lapisan masyarakat. Pemerintah daerah adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yang memiliki tugas dalam urusan beberapa persoalan - persoalan ekonomi serta sosial ditengah - tengah masyarakat dan mendorong semangat musyawarah.

4. Konsep Pantai Berseri

Pantai berseri adalah melaksanakan Gerakan Pengurangan Sampah Plastik (Pantai Berseri) kegiatan kampanye serta aksi bersih sampah plastik melibatkan masyarakat, pemerintah kabupaten dan personil TNI - Polri, pramuka, karang taruna, PKK, Aparat Kecamatan dan Desa diapresiasi Pememerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta Legislator Selayar. Secara masif Gerakan dilaksanakannya secara serentak di 11 Kecamatan dengan lokasi khusus 22 kilometer Pesisir Pantai yang dibersihkan dari sampah.

Sementara itu, Kepala DKP Sulawesi Selatan Bernama, Muhammad Ilyas yang mengatakan, permasalahan sampah harus segera terselesaikan, sampah sudah mengotori lingkungan laut dan adanya dampak pada kelestarian alam. Dampak sampah plastik banyak hal utamanya pada lingkungan selain itu, kesehatan serta pariwisata juga terdampak, serta mampu mempengaruhi ketersediaan ikan. Hal ini, guna menjaga keamanan pangan, demikian juga,

menjaga stabilitas ekspor utamanya mengenai ikan yang tidak ada sampah plastik atau partikel plastik (Mikroplastik) hal ini perlu diantisipasi. Produksi ikan juga begitu tergantung pada keadaan laut, termasuk tidak adanya sampah. Kepulauan Selayar terbentang dari utara ke selatan setiap musimnya mendapat kiriman sampah - sampah dari luar yang begitu banyak. Meski tidak dapat di pungkiri adanya sampah lokal yang dihasilkan. Untuk itu sangat mendorong agar permasalahan sampah bisa diselesaikan dan tingkat produksi perikanan bisa ditingkatkan mengenai sampah yang bisa mendorong peningkatan produksi hasil perikanan dan program prioritas Bupati mengenai Kawasan wilayah ekonomi khusus pariwisata.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dipakai menjadi dasar ataupun landasan dalam pengembangan beberapa konsep teori yang dipakai pada penelitian dan hubungan terhadap rumusan masalah. Memicu pada konsep kolaborasi, kolaborasi ini ialah usaha mempertemukan seluruh sector, baik pemerintah maupun nonpemerintah dalam mengatur, mengelola dan mengatur semua urusan bersama untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif. Dari uraian di atas maka, tulisan ini akan memaparkan kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat dalam program pantai berseri di Kepulauan Selayar. Penyelenggaraan program pantai berseri ini meliputi Dinas Kelautan serta kelompok masyarakat. Ada 3 proses pada tata kelola kolaborasi yaitu Partisipasi, Komunikasi, dan akseptasi.

Maka dari itu, penulis merumuskan kerangka pikir atas dasar teori Yuliani (2017) dalam (Tanjung, 2019) tentang *collaborative governance* dalam program pantai berseri yang di gambarkan kedalam bagan sebagai berikut:

Kerangka Pikir



Gambar 2.2 Bagan Kerangka Pikir

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan bagan kerangka pikir yang sudah disusun maka, yang jadi fokus penelitian *collaborative government* dalam program pantai berseri yaitu : Partisipasi (*Participation*), Komunikasi (*Communication*), Akseptasi (*Acceptable*).

E. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Partisipasi (*Participation*)

Salah satu hal keterlibatan dalam merespon kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atas keterlibatannya.

2. Komunikasi (*Communication*)

Sebagaimana komunikasi pemerintah sangat penting dan harus terlibat langsung dalam proses pertukaran informasi dan komunikasi mengenai kebijakan, ide atau gagasan dan keputusan antara pemerintah maupun pihak yang bersangkutan.

3. Akseptasi (*Accepteble*)

Proses suatu perjanjian MOU pada saat melaksanakan kerjasama baik antara pemerintah dengan masyarakat dalam program pantai berseri.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adanya waktu pada penelitian ini ialah dilakukan dengan waktu kurang lebih dua bulan dan lokasi penelitian di Desa Mekar Indah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Kolaborasi Pemerintah dengan Masyarakat dalam Program Pantai Berseri. Alasan memilih objek lokasi penelitian itu ialah menjadi lokasi yang pusat dilaksanakan program Pantai Berseri.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis serta tipe penelitian yang dipakai pada penelitian tentang kolaborasi pemerintah dan masyarakat pada program pantai berseri adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif yaitu menjawab suatu masalah dengan cara mendalam dalam jangka waktu serta juga situasi yang berkaitan, hal ini dilaksanakan dengan wajar serta alami sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Landasan teori di manfaatkan untuk menjadi pandangan/pemandu agar kiranya fokus penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Langkah penelitian yang di maksud diantaranya melaksanakan pengamatan pada narasumber lapangan, melakukan interaksi pada mereka dan juga berusaha untuk memahami bahasa serta tafsiran narasumber. Maka dari itu peneliti perlu turun langsung di lapangan dengan membutuhkan waktu yang cukup lama.

2. Tipe penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan tipe pendekatan studi kasus fenomenologi yaitu pendekatan studi kasus yang mana data bisa di peroleh dari seluruh pihak /tokoh yang terlibat, baik itu lewat Wawancara, Observasi, serta dokumentasi. Data di peroleh dari macam cara tersebut pada dasarnya agar saling memenuhi/mencukupi. Jika adanya data yang di dapatkan dari Wawancara tidak lengkap atau cukup, hingga mesti di cari melalui dengan opsi lain seperti melakukan observasi, juga bisa dokumentasi.

C. Sumber data

Pada penelitian di jaring pada sumber data primer juga sekunder sesuai apa tujuan dari penelitian ini.

1. Data Primer

Data di dapatkan langsung terhadap hasil lapangan seperti hasil Wawancara bersama beberapa tokoh yang benar-benar berkompetensi dan juga siap untuk memberi data atau informasi yang diperlukan dengan kebutuhan penelitian. Seperti tokoh pemerintah yang mengenai pada penelitian.

2. Data Sekunder

Data di dapatkan dari bacaan-bacaan maupun kajian - kajian pustaka, buku-buku ataupun *literatur* yang berkaitan atas masalah yang telah di teliti, internet, dokumen serta laporan - laporan yang sumber oleh lembaga bersangkutan pada keperluan data pada penelitian ini.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian ialah tokoh Narasumber ataupun seseorang yang di minta informasi terkait pada penelitian yang di lakukan, informan pada penelitian di pilih atas orang-orang yang tahu apa inti masalah pada penelitian. Yang mana informan di harapkan mampu memberikan data objektif, data netral dan juga mampu di pertanggungjawabkan. Adapun informan atas penelitian terkait kolaborasi pemerintah dengan masyarakat dalam program pantai berseri adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama	Inisial	Jabatan
1.	Muhammad Risal	MR	Kepala Dusun Desa Mekar Indah
2.	Nurding	ND	Kepala Desa Mekar Indah
3.	Hilda	HL	Sekretaris Desa Mekar Indah
4.	Rian	RN	RT Desa Mekar Indah
5.	Muh. Risal Majid	MRM	Masyarakat
6	Baso Lolo	BL	Masyarakat

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah cara atau teknik yang bisa dipakai pada peneliti dalam mengumpul data, juga pengumpulan data ialah alat pembantu yang di pilih serta dipakai dari peneliti pada kegiatan pengumpulan data supaya kegiatan jadi sistematis juga menjadi mudah. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ialah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi ialah cara mengumpulkan data yang dilakukan lewat pengamatan, dengan diikuti pencatatan - pencatatan pada kondisi ataupun sikap objek sasaran. Dalam hal ini, peneliti yang lakukan pengamatan secara langsung yang terkait dengan Kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam program pantai berseri.

2. Wawancara

Proses akumulasi data yang dilakukan dengan bertanya (berkomunikasi langsung) pada narasumber yang sesuai atas jenis dan informasi data yang di perlukan. Saat wawancara adanya interaksi pewawancara dan Responden.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi sebagai pelengkap atas observasi dan wawancara serta menambah ketelitian, keaslian data ataupun Informasi terkumpul atas bahan Dokumentasi terhadap di lapangan sekaligus bisa di jadikan objek dalam pembuktian Keabsahan Data.

F. Teknik Analisis Data

Analisis Data merupakan langkah melihat juga disusun dengan cara teratur pada data yang didapat dari hasil wawancara, dokumentasi lapangan dan catatan lapangan,. Teknik ini langkah dalam mengatur dan menyusun data ke dalam bentuk, satuan uraian dasar, dan kategori hingga bisa menemukan tema sehingga mampu di rumuskan spekulasi kerja yang telah di sarankan dari data (Moleong, 2012). Terdapat 3 komponen :

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Proses reduksi data mengkaitkan 2 tahap. Tahap pertama, mengaitkan proses edit, kategorisasi, dan juga ringkasan. Untuk tahap kedua, merangkai aturan dan catatan terkait hal-hal, salah satunya yang berhubungan pada aktifitas dan langkah-langkah sampai-sampai mendapatkan tema, kategori, serta Pola Data.

2. Penyajian data (*Data display*)

Proses mengorganisasikan data, yaitu merangkai kategorisasi data yang satunya dengan kategorisasi data lainnya sampai semua data yang dikaji akurat dikaitkan dalam satu, dikarenakan dalam penelitian kualitatif data bermacam-macam pandangan dan kumulatif.

3. Penarikan serta pengujian kesimpulan (*Drawing and Verifying Conclusions*)

Penarikan dan penguji kesimpulan yang berdasarkan penerapan prinsip-prinsip induktif dan memikirkan model data yang telah ada atau cenderung dari penyajian data yang sudah disusun.

G. Keabsahan Data

Pengabsahan data untuk penelitian ini yang digunakan ialah teknik triangulasi yaitu diantaranya:

1. Triangulasi sumber

Dilakukan proses mengecek data yang telah didapat lewat sumber - sumber. Maka dari itu, penelitian melakukan akumulasi dan uji data yang telah didapat lewat pengamatan, melalui Wawancara dan Dokumen yang ada lalu melakukan perbandingan hasil pengamatan dan Wawancara terus dibandingkan hasil Wawancara dan Dokumen yang sudah ada.

2. Triangulasi teknik

Teknik ini dilakukan dengan teknik akumulasi data berbeda agar memperoleh data oleh sumber yang sama, dalam hal sudah didapat dan melakukan Wawancara, kemudian mencocokkan pada hasil Observasi dan Dokumen yang ada. Jika terhadap ketiga teknik uji kebenaran data itu menciptakan data berbeda maka dari itu, dalam penelitian perlu dilakukan diskusi dengan informan yang berkaitan untuk memastikan data yang mana dianggap benar dan tidak atau mungkin semua akurat karena spekulasi yang berbeda.

3. Triangulasi waktu

Data yang di kumpulkan melalui wawancara dipagi hari waktu narasumber masih segar, tidak ada kendala dalam memberikan atau menyampaikan data. Maka dari itu, dalam rangka pengujian kebenaran data yang di lakukan dengan proses pembuktian dengan wawancara, dan observasi dalam waktu dan situasi yang tidak sama. Jika pengujian mendapatkan data yang beda maka dari itu perlu melakukan dengan berkali-kali sampai menemukan kebenaran data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kabupaten Kepulauan Selayar

Kabupaten Kepulauan Selayar ialah suatu Kabupaten terletak di provinsi Sulawesi - Selatan. Dengan ibu kota Kabupaten Kepulauan Selayar ialah Kota Benteng. Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai luas yang sebesar 10.503,69 km² wilayah daratan dan lautan dengan penduduk sebanyak ±134.000 jiwa. Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari 2(dua) sub-area wilayah pemerintahan diantaranya wilayah daratan yang mencakup Kecamatan Benteng, Bontoharu, Bontomanai, Buki, Bontomatene, dan Bontosikuyu dan wilayah Kepulauan yang mencakup Kecamatan Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur, Takabonerate, Pasimarannu dan Pasilambena.

Secara astronomis Kepulauan Selayar terletak di antara 5°42' - 7°35' lintang Selatan dan juga 120°15' - 122°30' bujur Timur, wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari 130 Pulau baik itu pulau besar, maupun pulau kecil. Kepulauan itu sebagian besar ditempati penduduk sebagian juga ialah pulau yang tidak ada penghuni. Pulau-pulau yang ada penghuni itu diantaranya: Pulau Pasi Tanete, Pulau Pasi Gusung, Bahuluang, Tambolongang, Polassi, Jampea, Lambego, Bonerate, Pasi Tallu, Kakabia, Jinato, Kayuadi, Rajuni, Rajuni Bakka, Rajuni Ki'di, Kalaotoa, Latondu, Pulo Madu dan juga lain-lainnya. Jumlah keseluruhan pulau yang ada penghuni 34 buah dengan batas wilayah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba (Selat Bira);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Flores;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar;
- Sebelah Selatan dengan Laut Flores dan Nusa Tenggara Timur.

Terkait dengan posisi strategis Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana bahwa Selat Selayar dilintasi pelayaran nusantara baik ke timur maupun ke barat, bahkan sudah menjadi pelayaran internasional. Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan "kepulauan" yang berada di antara jalur alternatif perdagangan internasional yang menjadikan daerah ini secara geografis sangat strategis sebagai pusat perdagangan dan distribusi baik secara nasional untuk melayani Kawasan Timur Indonesia (KTI) maupun pada skala internasional guna melayani negara-negara di kawasan Asia.

Kabupaten Kepulauan Selayar terletak di tengah bentangan barat-timur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan berada diantara Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yakni ALKI II dan III. Keunggulan tersebut dilengkapi lagi dengan bentangan garis pantai yang mayoritas berbatasan dengan laut dalam, yang selama ini digunakan sebagai jalur lalu lintas transportasi domestik, nasional dan internasional. Jalur transportasi tersebut melalui Selat Bira, sehingga Selayar sangat potensial dikembangkan sebagai Pusat Distribusi Logistik bahan kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak ke Kawasan Timur Indonesia. Lebih jauh lagi pengembangan Kabupaten Kepulauan Selayar dan pulau-pulau kecil di sekitarnya didukung pula oleh potensi sumberdaya alam,

terutama disektor perminyakan di kawasan utara Pulau Selayar, sektor perikanan dan pariwisata di kawasan tengah dan selatan Pulau Selayar dan Taman Nasional Takabonerate.

Sebelumnya, Kabupaten Kepulauan Selayar pernah jadi rute perdagangan menuju pusat rempah - rempah di Maluku. Di Pulau Selayar para pedagang-pedagang singgah dalam mengisi bekal sembari menunggu musimnya yang terbaik dalam berlayar. Dari kegiatan pelayaran muncullah nama Selayar, nama Selayar yang berasal dari kata Cedaya (bahasa sanskerta) yang artinya satu layar karena konon katanya banyaknya perahu satu layar yang selalu singgah dipulau. Kata Cedaya sudah di abadikan namanya dalam kitab negarakertagama Karangan Empu Prapanca yang pada abad-14. Pada tengah abad-14, pada saat Majapahit di pimpin oleh Hayam Wuruk yang bergelar Rajasanegara, Selayar di golongankan pada Nusantara, ialah pulau - pulau lainnya diluar Jawa yang ada dibawah kuasa Majapahit, artinya Armada Gajah Mada atau Laksamana Nala pernah singgah di pulau tersebut.

Selain dari nama Selayar pulau tersebut di namakan dengan Tanadoang yang artinya tanah tempat berdoa. Sebelumnya, Pulau Selayar jadi tempat berdoa untuk para pelaut yang akan melanjutkan perjalanan baik itu ke-barat maupun ke-timur demi keselamatan pelayaran. Pada kitab pelayaran dan perdagangan Amanna Gappa abad-17 Selayar di sebut sebagai salahsatu daerah tujuannya Niaga dikarenakan letak daerah yang strategis untuk tempat persinggahan.

Kabupaten Selayar yang merupakan salah satu Kabupaten dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822). Yang kemudian berubah nama menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan PP. No. 59 Tahun 2008.

Adapun visi dan misi Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu diantara lain :

1) Visi

- Kepulauan Selayar sebagai bandar maritim Kawasan Timur Indonesia.

2) Misi

- Mengembangkan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan
- Meningkatkan kualitas pembangunan-pembangunan perdesaan
- Meningkatkan kualitas hidup
- Mengembangkan pengelolaan potensi dan keagamaan
- Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup

1. Collaborative governance dalam program pantai berseri di Kabupaten Kepulauan Selayar

Collaborative governance adalah bagian dari kebijakan pemerintah dalam proses kegiatan kolaborasi dengan mengatur suatu keputusan dalam proses kebijakan yang dilakukan oleh beberapa lembaga publik dengan pihak lain yang terkait dan terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah untuk merespons perdebatan akademik terkait pantai dengan lingkungan yang jauh dari kata baik dengan melakukan kolaborasi dengan program pantai berseri.

Terciptanya *collaborative governance* dalam program pantai berseri di Kabupaten Kepulauan Selayar yang akan dianalisa oleh peneliti dengan menggunakan teori prinsip-prinsip kolaborasi yang dikemukakan oleh Yuliani (2017), pada penelitian ini dapat dilihat dari 4 prinsip kolaborasi yaitu : (1) Partisipasi, (2) Komunikasi, (3) Akseptasi. Adapun hasil penelitian terkait *collaborative governance* dalam program pantai berseri di Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut :

a. Partisipasi

Partisipasi artinya salah satu bentuk keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam memberikan respon terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atas keterlibatannya dalam pelaksanaan

program pantai berseri. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pantai berseri merupakan salah satu prioritas yang harus tercapai dalam kegiatan pemanfaatan pembebasan sampah dari pantai. Kegiatan pelaksanaan program pantai berseri yang dilakukan haruslah berdampak pada meningkatkannya kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan Kawasan pantai yang terbebas dari sampah.

Partisipasi merupakan keterlibatan komponen dalam mewujudkan tujuan yang baik fisik maupun non-fisik yang termasuk dalam prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan dengan keterlibatan masyarakat yang harus didasarkan pada prinsip penyediaan informasi yang transparan dan lengkap serta pemberitahuan kegiatan terlebih dahulu untuk melakukan program pantai berseri. Harus diberlakukannya sistem partisipasi dalam melaksanakan program pantai berseri agar *stakeholder* dapat melakukan program dengan relevan dengan kolaborasi masyarakat.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dikemukakan oleh Kepala Desa Mekar Indah Bernama Nurding, yang mengatakan bahwa :

“Kolaborasi maupun kerja sama antara masyarakat kawasan pantai itu memang harus ada kerja sama yang baik dimana pelestarian wilayah pantai dengan menjalankan suatu program berseri, dengan adanya program berseri ini kita dapat menikmati pantai dengan kebersihan yang baik, karena apabila pantai ini terbengkal tidak diadakannya panta berseri maka kita sendiri yang akan rugi nantinya kenapa saya mengatakan hal tersebut, pantai ini akan terbengkal dan hilang keindahannya sehingga tidak ada yang ingin pergi berwisata di pantai ini. Oleh sebab itu, kita ada kerja sama dan masyarakat semua berpartisipasi dalam menjalankan kegiatan ini” (Hasil Wawancara ND, 03 April 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa *collaborative* dalam hal partisipasi pihak pemerintah dan masyarakat melakukan

kerja sama dalam pelestarian atau menjalankan program pantai berseri guna untuk menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi, sedemikian terbengkalainya pantai yang ada di Desa Mekar Indah.

Hal tersebut didukung dari pernyataan Sekertaris Desa Mekar Indah Bernama Hilda, yang mengatakan bahwa :

“Dalam berjalannya program pantai berseri ini didukung juga tak lain partisipasi masyarakat yang sangat antusias dalam pelaksanaan kegiatan atau program ini, dan begitu juga untuk pemerintah setempat yang bersemangat dalam menjalankan program pantai berseri, dengan partisipasi dengan kehadiran tokoh-tokoh pemerintah Kepulauan Selayar, sehingga kerja sama kami baik dengan kolaborasi yang berjalan ini harus dijaga dimana kebijakan-kebijakan bukan keputusan sepihak karena ini juga menyangkut masalah pelestarian lingkungan” (Hasil Wawancara HL, 03 April 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa kolaborasi setiap *stakeholder* diantaranya pemerintah dan masyarakat dalam hal partisipasi menjalankan program pantai berseri sejalan karena mengingat pelestarian lingkungan pantai sangat penting untuk dijaga dan memiliki otoritas membuat suatu kebijakan yang bertujuan untuk pelestarian Kawasan lingkungan pantai.

Tambahan pernyataan diatas yang mengatakan bahwa :

“Dalam kegiatan program pantai berseri ini kita melibatkan beberapa seperti dinas pariwisata, karang taruna dan juga dinas lingkungan hidup yang semua ini terlibat dan berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan program pantai berseri ini” (Hasil wawancara HL, 03 April 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa beberapa kelompok yang berpartisipasi diantaranya dinas pariwisata, karang taruna, dan dinas lingkungan hidup.

Salah satu masyarakat yang bernama Baso Lolo juga menambahkan, yang
bahwa :

“Mendengar akan diadakan program pantai berseri saya sebagai masyarakat sangat menantinya karena dengan begitu pantai yang sebelumnya tidak terurus lingkungannya akan teratasi, nah dengan begitu saya ikut serta berpartisipasi dalam kolaborasi pelaksanaan program pantai berseri ini, sehingga perbandingan untuk sekarang pantai yang sudah amat indah dan baik akan untuk di kunjungi atau jalan-jalan, karena sebelumnya kawasan pantai masih belum total dalam hal memperbaiki ataupun menambah” (Hasil wawancara BL, 04 April 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis menyimpulkan bahwa dalam hal partisipasi dalam kolaborasi masyarakat ikut serta dalam pelaksanaan program pantai berseri dan sangat menantikan akan adanya perubahan atau pantai yang sebelumnya masih belum total dalam hal memperbaiki ataupun menambah karena akan menjadi pantai yang indah dengan lingkungan.

Kemudian salah satu masyarakat bernama Muh. Rizal Majid juga menambahkan yang mengatakan bahwa :

“Kita sebagai masyarakat kan nurut-nurut saja dengan apa yang diarahkan, maka dari itu kita sangat berpartisipasi dalam pelaksanaan program pantai berseri ini karena hal ini juga sangat berdampak baik pada kita sebagai masyarakat, jadi dengan penuh semangat dan senang dijalankannya program pantai berseri ini guna untuk menghidupkan wilayah sekitar Kawasan pantai berseri ini” (Hasil wawancara MRM, 04 April 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, masyarakat penuh semangat berpartisipasi dalam menjalankan program pantai berseri dengan melakukan kerja sama yang baik dengan tokoh-tokoh pemerintah yang terlibat dalam kegiatan atau program pantai berseri.

RT Desa Mekar Indah yang bernama Rian juga menambahkan yang mengatakan bahwa :

“Kolaborasi dalam program pantai berseri yang adlam bentuk mengelola sampah sekitar Kawasan pantai yang mana yang berpartisipasi tokoh-tokoh masyarakat seperti RT dan tokoh masyarakat penggerak dan Lembaga khusus (lingkungan hidup dan peduli terhadap sampah) yang dilakukan dengan bergotong royong. Kolaborasi ini juga sangat mengapresiasi sinergi ini dalam upaya mengurangi sampah plastik dan membersihkan laut dan pantai kita dari sampah plastik. Sekaligus mendorong pengelolaan sampah” (Hasil Wawancara RN, 03 April 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan penulis dapat mengemukakan kesimpulan yang mana bentuk kolaborasi dilakukan dengan gotong royong dengan partisipasi tokoh masyarakat penggerak.

Tambahan dari Kepala Desa Mekar Indah yang Bernama Nurding yang mengatakan bahwa :

“Adapun alat ataupun yang hatrus dibuat yaitu membuat tanggul, yang masyarakat berpartisipasi dalam pembuatan tanggul sebagai tenaga tambahan dalam pembuatan tanggul yang dikerjakan warga Desa Mekar Indah melakukan gotong royong agar supaya ombak yang menerjang keras naik ke rumah warga bisa dihadang oleh tanggul yang kokoh” (Hasil Wawancara ND, 03 April 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas yaitu bahwa pembuatan tanggul dikerjakan bersama masyarakat untuk menghadang ombak pantai.

Tambahan dari masyarakat yang mengatakan bahwa :

“Untuk pembuatan tanggul itu kita sebagai masyarakat bergotong royong dan juga pemerintah bekerja sama dan untuk dana pembuatan tanggul itu pemerintah desa menyalurkan dan sebagai bentuk dari program pantai berseri yang melibatkan masyarakat dalam pembuatan tanggul” (Hasil Wawancara dengan MRM,04 April 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa pemerintah desa menyalurkan dana dalam pembuatan tanggul untuk menhan terjangan ombak pantai.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi di lapangan oleh penulis mengemukakan bahwa partisipasi dalam *collaborative governance* dalam program pantai berseri dapat disimpulkan bahwa partisipasi yang dilakukan setiap *stakeholder* melakukan atau menjalankan program pantai berseri pihak pemerintah dan masyarakat melakukan kerja sama dalam pelestarian atau menjalankan program pantai berseri guna untuk menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi, sedemikian terbengkalainya pantai yang ada di Desa Mekar Indah. Menjalankan program pantai berseri sejalan karena mengingat pelestarian lingkungan pantai sangat penting untuk dijaga dan memiliki otoritas membuat suatu kebijakan yang bertujuan untuk pelestarian Kawasan lingkungan pantai. kolaborasi masyarakat ikut serta dalam pelaksanaan program pantai berseri dan sangat menantikan akan adanya perubahan atau pantai yang sebelumnya masih belum total dalam hal memperbaiki ataupun menambah karena akan menjadi pantai yang indah dengan lingkungan. Dan masyarakat penuh semangat berpartisipasi dalam menjalankan program pantai berseri dengan mealakukan kerja sama yang baik dengan tokoh-tokoh pemerintah yang terlibat dalam



kegiatan atau program pantai berseri, menyalurkan dana dalam pembuatan tanggul untuk menahan terjangan ombak pantai.

Gambar 4.3 Beberapa kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pelaksanaan program atau Gerakan pantai berseri di Kabupaten Kepulauan Selayar

b. Komunikasi

Komunikasi artinya kualitas komunikasi pemerintahan sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus terlibat langsung dalam proses pertukaran informasi dan komunikasi terkait kebijakan, ide atau gagasan dan keputusan antara pemerintah maupun pihak yang bersangkutan. Komunikasi secara interpersonal pemerintah dan masyarakat cukup memahami terkait Kawasan wilayah pantai. Dengan komunikasi yang dapat membantu dalam mengkreasikan realitas budaya dari suatu komunitas.

Sebagaimana dari hasil wawancara oleh Kepala Dusun Desa Mekar Indah yang Bernama Muhammad Risal, yang mengatakan bahwa :

“Saya sebagai kepala dusun tempat pantai itu berada, jadi saya bertanggung jawab penuh dalam melakukan penyampaian ataupun menginformasikan kesemua orang-orang mengenai akan dilaksanakannya program pantai berseri, dan sebelumnya juga telah dilaksanakan pertemuan dengan pemerintah dan tokoh masyarakat, dalam pertemuan itu kita bahas seperti apa nantinya program ini dijalankan yang tak lain juga kita sebagai aparat desa yang meminta saran dari masyarakat, akan diapakan pantai ini agar terlihat indah dan agar ramai pengunjung” (Hasil wawancara MR, 03 April 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat mengemukakan bahwa dalam hal komunikasi semua *stakeholder* telah melakukan pertemuan guna untuk

membahas seperti apa program pantai berseri yang akan dilakukan atau dijalankan.

Sesuai dengan pernyataan di atas Kepala Desa Mekar Indah juga menambahkan yang mengatakan bahwa :

“seperti yang dikatakan bapak kadus bahwa sebelum dilaksanakan program pantai berseri telah dilaksanakan pertemuan, hal ini juga untuk melihat bagaimana kerja sama masyarakat dalam perencanaan kegiatan atau program pantai berseri dengan menginformasikan apa saja kebijakan-kebijakan yang akan ada dalam melakukan pelestarian lingkungan pantai, agar hal yang tak diinginkan tidak terjadi, dan untuk komunikasi ke semua warga atau masyarakat terkait program sangat diterima oleh masyarakat dengan kebijakan ini, dan kita selalu memberi informasi apapun itu yang melibatkan masyarakat” (Hasil wawancara ND, 03 April 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat mengemukakan bahwa, mengenai komunikasi selalu diinformasikan ke siapapun yang terlibat, dengan memberikan informasi seperti apa kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan, hal ini guna melindungi wilayah agar hal yang tak diinginkan tidak terjadi.

Hal tersebut didukung oleh pernyataan salah satu masyarakat Bernama Baso Lolo, yang mengatakan bahwa :

“untuk komunikasi pemerintah ke masyarakat sendiri itu bagus, dan mengenai program pantai berseri ini sebelumnya memang sudah diinformasikan terlebih dahulu sebagaimana kebijakan-kebijakannya dan juga meminta usulan terhadap masyarakat, jadi saya sebagai masyarakat mengatakan hal itu karena masyarakat selalu dilibatkan apapun itu, dan untuk program pantai berseri ini salah satu kebijakan yang sangat menguntungkan dan juga baik, komunikasi pemerintah ke masyarakat terkait program ini juga sangat diutamakan” (Hasil wawancara BL, 04 April 2023)

Berdasarkan hasil wawancara yang di atas penulis dapat mengemukakan bahwa pemerintah selalu memberikan informasi terhadap masyarakat dan selalu melibatkan keberadaan masyarakat apapun kegiatannya.

Salah satu masyarakat yang bernama Muh. Risal Majid juga menambahkan, yang mengatakan bahwa :

“Dalam kerja sama dalam program pantai berseri ini diharapkan berjalan dengan baik, yang mana kerja sama ini tidak mungkin di putuskan oleh satu pihak saja karena pasti dari kedua belah pihak yang bekerja sama agar berjalan dengan baik, jadi dengan adanya komunikasi ini sangat baik dengan berbagi informasi, baik itu informasi yang baik maupun informasi yang buruk, yang penting antara pemerintah dan masyarakat tidak terlepas untuk memberi atau saling memberi informasi, seperti program yang ini berjalan dengan baik karena komunikasi yang baik sehingga kegiatan berjalan dengan sebagaimana mestinya” (Hasil wawancara MRM, 04 April 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis dapat mengemukakan bahwa dalam hal komunikasi kolaborasi berjalan sebagaimana mestinya karena komunikasi yang baik dan selalu memberi informasi bagaimana kebijakan yang akan dijalankan.

Tambahan pernyataan di atas yaitu mengatakan bahwa :

“Pemerintah desa melakukan pertemuan atau rapat dengan masyarakat desa dalam membahas waktu pelaksanaan dan pemeliharaan pantai setiap minggunya dengan masyarakat dalam menyelenggarakan program pantai berseri” (Wawancara dengan MRM, 04 April 2023)

Dari hasil wawancara di atas dan hasil observasi di lapangan, penulis dapat mengemukakan bahwa *collaborative governance* dalam program pantai berseri di Kepulauan Selayar dalam prinsip komunikasi dapat disimpulkan bahwa dalam hal komunikasi semua *stakeholder* telah melakukan pertemuan guna untuk membahas seperti apa program pantai berseri yang akan dilakukan atau dijalankan. Mengenai komunikasi selalu diinformasikan ke siapapun yang terlibat, dengan memberikan informasi seperti apa kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan, hal ini guna melindungi wilayah agar hal tak diinginkan tidak terjadi. Pemerintah selalu

memberikan informasi terhadap masyarakat dan selalu melibatkan keberadaan masyarakat apapun kegiatannya. Dalam hal komunikasi kolaborasi berjalan sebagaimana mestinya karena komunikasi yang baik dan selalu memberi informasi bagaimana kebijakan yang akan dijalankan.



Gambar 4.4 Melakukan penyampaian terkait akan dilaksanakan program atau Gerakan Pantai Berseri dengan melakukan pertemuan

c. Akseptasi

Akseptasi artinya proses suatu perjanjian ketika melakukan kerja sama baik antara pemerintah – masyarakat maupun didalam pelestarian lingkungan Kawasan wilayah pantai. Budaya kerja sangat berpengaruh terhadap kesuksesan kolektif yang akan dicapai sebagai bentuk perilaku pendapat dan tujuan yang ingin dicapai yang dimana Akseptasi yang menentukan bagaimana beradaptasi dan mampu menempatkan tingkat produktivitas dalam proses perjanjian kerja sama dan mengembangkan lingkungan atau Kawasan.

Sebagaimana hasil wawancara Kepala Ddesa Mekar Indah Bernama Nurding yang mengatakan bahwa :

“Bahwa pelestarian wilayah pantai atau program pantai berseri antara pemerintah dengan masyarakat dengan ini adalah kepentingan bersama maksudnya dalam kegiatan program pantai berseri kita harus saling berkolaborasi ataupun bekerja sama dan menimbulkan kesadaran akan saling memiliki dan rasa tanggung jawab yang besar agar dalam kegiatan program pantai berseri ini bisa tercapai dengan baik dan ramai pengunjung. Dan wilayah Selayar terbentang dari utara ke selatan, setiap musimnya kami mendapat kiriman sampah-sampah dari laur yang sangat banyak. Meski tidak bisa dipungkiri ada sampah lokal yang dihasilkan. Ini harus ditangani serius” (Hasil wawancara ND, 03 April 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat mengemukakan bahwa dalam hal prinsip akseptasi dengan adanya kolaborasi dapat menimbulkan kesadaran dalam kerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan memiliki rsaa tanggung jawab.

Sesuai dengan pernyataan Kepala Dusun Desa Mekar Indah yang Bernama Muhammad Risal yang mengatakan bahwa :

“Kolaborasi maupun kerja sama ini dilakukan dengan cara menerima usulan-usulan apapun itu baik itu dari pemerintah maupun masyarakat supaya tujuan dari kolaborasi ini dapat tercapai sebagaimana mestinya yang diharapkan, dan saling membantu dana saling mendukung serta berpartisipasi guna menyukseskan progam pantai berseri” (Hasil wawancara MR, 03 April 2023)

Berdasarkan hasil wawancara yang ada di atas, peneulis dapat mengemukakan bahwa kolaborasi maupun Kerjasama ini dilakukan dengan cara rela dengan menerima unsur-unsur baru dari pihak lain sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan Bersama.

Sekretaris Desa Mekar Indah bernama Hilda juga menambahkan yang mengatakan bahwa :

“Untuk hal itu kami sebagai tokoh pemerintah yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap kawasan maka dari itu kami ingin kawasan ini menjadi lebih baik dari sebelumnya hanya itu yang kami harapkan dan untuk masyarakat kami harapkan usulan-usulan terhadap kebijakan sebagaimana program pantai berseri ini berjalan. Juga termasuk menjaga keamanan pangan kita, demikian juga menjaga stabilitas ekspor kita terutama terkait ikan yang tidak ada sampah plastik atau partikel plastik (mikroplastik), ini harus diantisipasi. Produksi ikan juga sangat tergantung kondisi laut, termasuk tidak ada sampah” (Hasil wawancara HL, 03 April 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat mengemukakan bahwa, dalam hal prinsip akseptasi yang mana pemerintah yang lebih memiliki tanggung jawab penuh terhadap kawasan pantai dan besar harapan untuk merubah Kawasan pantai menjadi lebih baik dengan begitu adanya program pantai berseri.

Salah satu masyarakat Bernama Baso Lolo juga menambahkan yang mengatakan bahwa :

“Yang kami ketahui disini sebagai masyarakat hanyalah perubahan yang lebih baik telah terjadi untuk itu kami pun sangat berterima kasih atas semua kebijakan yang telah di lakukan oleh pemerintah” (Hasil wawancara BL, 04 April 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis mampu mengemukakan bahwa masyarakat Kawasan pantai sangat mendukung penuh atas kegiatan program pantai berseri karena masyarakat juga bisa merasakan apa yang seharusnya dijaga.

Sebagaimana dari hasil wawancara masyarakat yang Bernama Muhammad Rizal Majid yang mengatakan bahwa :

“Mengenai Kawasan ini diadakan program pantai berseri kami para masyarakat sangat mendukung penuh apapun yang telah di wewenangkan oleh para penyelenggara kegiatan atau program baik pemerintah maupun masyarakat sekitar” (Hasil wawancara MRM, 04 April 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa masyarakat Kawasan pantai berseri sangat mendukung akan kegiatan program pantai berseri.

Dari hasil wawancara di atas dan hasil observasi di lapangan, penulis dapat mengemukakan bahwa *collaborative governance* dalam program pantai berseri di Kepulauan Selayar dalam prinsip akseptasi yang dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kolaborasi dapat menimbulkan kesadaran dalam kerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan memiliki rasa tanggung jawab. kolaborasi maupun Kerjasama ini dilakukan dengan cara rela dengan menerima unsur-unsur baru dari pihak lain sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan Bersama dan pemerintah yang lebih memiliki tanggung jawab penuh terhadap kawasan pantai dan besar harapan untuk merubah Kawasan pantai menjadi lebih baik dengan begitu adanya program pantai berseri. Masyarakat Kawasan pantai sangat mendukung penuh atas kegiatan program pantai berseri karena masyarakat juga bisa merasakan apa yang seharusnya dijaga, masyarakat Kawasan pantai berseri sangat mendukung akan kegiatan program pantai berseri.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Ditinjau dari penelitian terdahulu yang berupaya melakukan kolaborasi atau kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat dalam pelestarian agar terciptanya Kawasan tempat wisata yang baik. Adanya kerja sama dan kolaborasi setiap *stakeholder* dalam mengelolah program PAMSIMAS. Serta adanya

kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam percepatan pengendalian *covid-19*.

1. Partisipasi

Partisipasi merupakan keterlibatan komponen dalam mewujudkan tujuan yang baik fisik maupun non-fisik yang termasuk dalam prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan dengan keterlibatan masyarakat yang harus didasarkan pada prinsip penyediaan informasi yang transparan dan lengkap serta pemberitahuan kegiatan terlebih dahulu untuk melakukan program pantai berseri. Harus diberlakukannya sistem partisipasi dalam melaksanakan program pantai berseri agar *stakeholder* dapat melakukan program dengan relevan dengan kolaborasi masyarakat.

Hal terpenting teralisasikannya partisipasi yang dilakukan setiap *stakeholder* melakukan atau menjalankan program pantai berseri pihak pemerintah dan masyarakat melakukan kerja sama dalam pelestarian atau menjalankan program pantai berseri guna untuk menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi, sedemikian terbengkalainya pantai yang ada di Desa Mekar Indah. Menjalankan program pantai berseri sejalan karena mengingat pelestarian lingkungan pantai sangat penting untuk dijaga dan memiliki otoritas membuat suatu kebijakan yang bertujuan untuk pelestarian Kawasan lingkungan pantai. kolaborasi masyarakat ikut serta dalam pelaksanaan program pantai berseri dan sangat menantikan akan adanya perubahan atau pantai yang sebelumnya masih belum total dalam hal memperbaiki ataupun menambah karena akan menjadi pantai yang indah dengan

lingkungan. Dan masyarakat penuh semangat berpartisipasi dalam menjalankan program pantai berseri dengan melakukan kerja sama yang baik dengan tokoh-tokoh pemerintah yang terlibat dalam kegiatan atau program pantai berseri.

2. Komunikasi

Komunikasi artinya kualitas komunikasi pemerintahan sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus terlibat langsung dalam proses pertukaran informasi dan komunikasi terkait kebijakan, ide atau gagasan dan keputusan antara pemerintah maupun pihak yang bersangkutan. Komunikasi secara interpersonal pemerintah dan masyarakat cukup memahami terkait Kawasan wilayah pantai. Dengan komunikasi yang dapat membantu dalam mengkreasikan realitas budaya dari suatu komunitas.

Dalam hal komunikasi semua *stakeholder* telah melakukan pertemuan guna untuk membahas seperti apa program pantai berseri yang akan dilakukan atau dijalankan. Mengenai komunikasi selalu di informasikan ke siapapun yang terlibat, dengan memberikan informasi seperti apa kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan, hal ini guna melindungi wilayah agar hal tak diinginkan tidak terjadi. Pemerintah selalu memberikan informasi terhadap masyarakat dan selalu melibatkan keberadaan masyarakat apapun kegiatannya. Dalam hal komunikasi kolaborasi berjalan sebagaimana mestinya karena komunikasi yang baik dan selalu memberi informasi bagaimana kebijakan yang akan dijalankan.

3. Akseptasi

Akseptasi artinya proses suatu perjanjian Ketika melakukan kerja sama baik antara pemerintah – masyarakat maupun didalam pelestarian lingkungan Kawasan wilayah pantai. Budaya kerja sangat berpengaruh terhadap kesuksesan kolektif yang akan dicapai sebagai bentuk perilaku pendapat dan tujuan yang ingin dicapai yang dimana akseptasi yang menentukan bagaimana beradaptasi dan mampu menempatkan tingkat produktivitas dalam proses perjanjian kerja sama dan mengembangkan lingkungan atau kawasan.

Dengan adanya kolaborasi dapat menimbulkan kesadaran dalam kerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan memiliki rsaa tanggung jawab. kolaborasi maupun Kerjasama ini dilakukan dengan cara rela dengan menerima unsur-unsur baru dari pihak lain sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan Bersama dan pemerintah yang lebih memeiliki tanggung jawab penuh terhadap kawasan pantai dan besar harapan untuk merubah Kawasan pantai menjadi lebih baik dengan begitu adanya program pantai berseri. Masyarakat Kawasan pantai sangat mendukung penuh atas kegiatan program pantai berseri karena masyarakat juga bisa merasakan apa yang seharusnya dijaga, masyarakat Kawasan pantai berseri sangat mendukung akan kegiatan program pantai berseri.

Jadi dari ketiga indikator yang mendasari pada apa yang telah di programkan dapat ditinjau dari ke tiga indicator diatas yang mana, setiap indicator terealisasikan sebagaimana mestinya berjalannya suatu program, dengan perbandingan dari penelitian terdahulu yang sama-sama mencakup terkait

pelaksanaan program di suatu daerah untuk melaksanakan atau menciptakan daerah atau Kawasan yang baik lagi. Dan melihat kerja sama atau kolaborasi tokoh-tokoh pemerintah Adapun masyarakat yang juga ikut serta ataupun turun tangan juga dalam memabntu menjalankan program dengan turun tangan membersihkan pesisir-pesisir pantai da kawasan pantai terdapat sampah-sampah liar.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kesimpulan yang bisa disimpulkan yaitu sebagai berikut:

- 1) Partisipasi : Bentuk partisipasi yaitu partisipasi kelompok masyarakat dan tokoh pemerintah dalam menjalankan kegiatan atau program pantai berseri, dengan ikut serta dalam berjalannya program pantai berseri, yang merupakan alat dimana warga atau masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan program pantai berseri. Beberapa kelompok yang bekerja sama atau berpartisipasi diantaranya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, Pemerintah Desa Mekar Indah, Karang Taruna, dan masyarakat, dan masyarakat ditugaskan untuk membuat tanggul sebagai penahan ombak pantai yang di danai oleh pemerintah Desa Mekar indah.
- 2) Komunikasi : Bentuk komunikasi yang dilakukan yaitu pihak pemerintah turun langsung menginformasikan atas kebijakan yang akan dijalankan terkait program pantai berseri dengan melukukan pertemuan Bersama masyarakat dengan pemerintah, yang pertemuan atau rapat dilakukan setiap minggu. Dengan begitu dengan baiknya komunikasi menjadi kunci utama kolaborasi berjalan dengan baik sehingga pelaksanaan program pantai berseri berjalan dengan semestinya.

- 3) Akseptasi : Bentuk akseptasi untuk merelaksasikan sikap diri pribadi dan prioritas, kebutuhan sereta tujuannya Organisasi dan memiliki tanggung jawab penuh dalam pelaksanaan kegiatan program pantai berseri. Dan dilakukan tanggung jawab oleh pemerintah atas tanggul yang dibuat sebagai pengganjal ombak pantai agar tidak menghambat rumah warga.

B. Saran

Dengan melihat kesimpulan serta menganalisa hasil penelitian dan pembahasan di atas maka, penulis memberi masukan/saran sebagai berikut diantaranya:

- 1) Dalam kolaborasi ini supaya bisa bertahan diharapkan adanya partisipasi terus dari semua *stakeholder* dalam kolaborasi program pantai berseri.
- 2) Dalam pelaksanaan kegiatan program pantai berseri harus ditingkatkan lagi bentuk kegiatannya sehingga tetap bertahan dari zaman yang semakin modern.
- 3) Diperlukan adanya peningkatan mutu saran dan prasarana pada pantai berseri di Kepulauan Selayar.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfianto. (2021). *Kolaborasi kepala desa dan badan permusyawaratan desa dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di desa bantilang kecamatan towuti kabupaten luwu timur* (Vol. 44, Issue 8). <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Anriana, A. (2018). *Aspek-aspek keberhasilan kolaborasi pemerintah daerah dan kepolisian dalam pemberantasan pemakai narkotika di kabupaten Takalar* (Vol. 5, Issue 3).
- Arrozaaq, D. L. C. (2016). Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3, 1–13. <http://repository.unair.ac.id/67685/>
- Yuliani (2017). *kolaborasi dalam perencanaan program kota kumuh.(KOTAKU)di kelurahan semanggi kota surakarta. Jurnal wacana publik. Vol.1,No 2. Hlm 33-47.*
- Febrian, R. A. (2016). Collaborative Governance Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan. *Wedana Jurnal Pemerintah, Politik Dan Birokrasi*, II, 200–208. <http://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1824> diakses pada tanggal 5 April 2019 pukul 02:55 WIB
- Nawir, F. A. (2022). *Kolaborasi pemerintah indonesia dengan unites nations high commisioner for refugees (unhcr) dalam penanganan pengungsi afghanistan di kota Makassar* (Issue 8.5.2017).
- Nur, M. (2019). *Kolaborasi Pemerintah daerah dengan kelompok tani dalam meningkatkan hasil produksi padi di kelurahan sangiasseri kabupaten sinjai* (Vol. 44, Issue 8). <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Nurianita Amsir. (2021). *kolaborasi pemerintah dengan masyarakat dalam percepatan pengendalian Covid-19 (Studi kasus Kebijakan penerapan PSBB)* (Vol. 19).
- Salma. (2020). *Kolaborasi pemerintah daerah dengan kelompok tani dalam produksi kopi arabika di kecamatan baroko kabupaten enrekang* (Vol. 44, Issue 8). <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Tanjung, A. (2019). *Kolaborasi dinas kebudayaan kabupaten gowa dengan masyarakat adat dalam pelestarian di kawasan pariwisata benteng somba opu* (Vol. 8, Issue 5).
- Tasruddin, R. (2018). Proses Kolaborasi Antar Pemerintah, Swasta, Dan Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah. *Jurnal Komodifikasi*, 48–59. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Komodifikasi/article/download/5500/4849>
- Triwahyuni, I. (2018). *Collaborative governance dalam pengembangan pelestarian budaya seni tari di kabupaten gowa.*

L

A

M

P

I

R

A

N









MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 0411 866972 Fax (0411) 865588 Makassar 90221 e-mail: lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 919/05/C.4-VIII/III/1444/2023

21 Sya'ban 1444 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

13 March 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0441/FSP/A.6-VIII/III/1444H/2023M, tanggal 13 Maret 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **ARDIANSYAH PRATAMA**

No. Stambuk : **10564 1105519**

Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM PANTAI BERSERI DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 17 Maret 2023 s/d 17 Mei 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://slmap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 13263/S.01/PTSP/2023 Kepada Yth.
Lampiran : - Bupati Kep. Selayar
Perihal : Izin penelitian

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 919/05/C.4-VIII/III/1444/2023 tanggal 13 Maret 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **ARDIANSYAH PRATAMA**
Nomor Pokok : 105641105519
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN
Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" COLLABORATIVE GOVERNMENT DALAM PROGRAM PANTAI BERSERI DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **17 Maret s/d 17 April 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 14 Maret 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung MPP Jln. Ahmad Yani Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 21083, email: pmptspseyalar@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 0576/Penelitian/III/2023/DIS PMPTSP

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

Nama Peneliti : **ARDIANSYAH PRATAMA**
Alamat Peneliti : **Dusun Parak Selatan**
Nama Penanggung Jawab : **-**
Anggota Peneliti : **-**

Untuk melakukan penelitian dalam rangka "Untuk Mengetahui Bagaimana Collaborative Government dalam Program Pantai Berseri di Kabupaten Kep. Selayar" di :

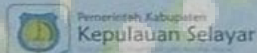
Lokasi Penelitian : **Desa Mekar Indah Kec. Bukti Kabupaten Kep. Selayar**
Judul Penelitian : **Collaborative Government dalam Program Pantai Berseri di Kabupaten Kepulauan Selayar**
Lama Penelitian : **2 Bulan**
Bidang Penelitian : **Ilmu Pemerintahan**
Status Penelitian : **Perorangan**

Surat Keterangan Penelitian ini berlaku sampai dengan tanggal 17 Mei 2023



Dikeluarkan : **Benteng**
Pada Tanggal : **16 Maret 2023**

A.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
KEPALA DINAS



Drs. H. ANDI NUR HALIQ, M.Si
NIP. 19660507 198603 1 022

Rp. 0,-
Tembusan

1. Kepala Badan Kesbangpol di Benteng
2. Arsip



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl Sultan Alauddin NO 259 Makassar 90221 Tlp (0411) 866972, 881593, Fax (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Ardiansyah Pratama

NIM : 105641105519

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 13 Juni 2023

Mengetahui

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,



Nurskam, S.Hum, M.I.P
NBM. 964 591

Riwayat Hidup



Ardiansyah Pratama, lahir di Selayar pada tanggal 08 Juni 2001, Penulis merupakan anak Pertama dari pasangan Arling dan Andi Rosdianah. Penulis mengawali pendidikan di, SD Inpres 2 Benteng Selayar, SMPN 2 Benteng Selayar, SMK Negeri 1 Benteng Selayar, dan pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada tahun 2023 Penulis berhasil menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar S1 Program Studi Ilmu Politik dengan judul “Collaborative Governance Dalam Program Pantai Berseri Di Kabupaten Kepulauan Selayar”. Penulis menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan punya rasa kesenangan tersendiri karena disamping menyelesaikan penelitian penulis juga melakukan kkp di Kantor Kecamatan Bungoro yang merupakan suatu pengalaman yang luar biasa. Harapan penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya terkhusus di Program Studi Ilmu Politik Unismuh Makassar.

